

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017**

BPTP YOGYAKARTA
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTP YOGYAKARTA adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTP YOGYAKARTA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTP YOGYAKARTA. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Yogyakarta, April 2018
Kepala Balai,

Dr. Joko Pramono
NIP. 196405281990021001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Pendapatan

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja

B.2.1 Belanja Pegawai

B.2.2 Belanja Barang

B.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.3 Persediaan

C.2 Aset Tetap

C.2.1 Tanah

C.2.2 Peralatan dan Mesin

C.2.3 Gedung dan Bangunan

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3 Aset Lainnya

- C.3.1 Aset Tak Berwujud
- C.3.2 Aset Lain-lain
- C.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
- C.4 Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.4.2 Uang Muka dari KPPN
- C.5 Ekuitas
 - C.5.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
 - D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.9 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/Defisit-LO
 - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4.1 Koreksi Nilai Persediaan
 - E.4.2 Penyesuaian Nilai Aset
 - E.5 Transaksi Antar Entitas
 - E.6 O'Ekuitas Akhir
 - E.6 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2 Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTP YOGYAKARTA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, April 2018
Kepala Balai,

Dr. Joko Pramono
NIP. 196405281990021001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTP YOGYAKARTA Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 349.093.947,00 atau mencapai 346,12% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 100,860,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 19.786.095.168,00 atau mencapai 96,22 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 20.563.456,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp 138.785.005.758,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 139.647.248,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 138.645.358.510,00 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 52.038.744.00 dan Rp. 138.732.967.014,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 320.766.297.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 20.117.536.968,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-19.796.770.671,00. Kegiatan Non

Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp. 760.080.250,00 dan Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp -18.992.088.421,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 53.455.707.719,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp- 18.992.088.421,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 84.823.395.245,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 19.445.952.471,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp. 138.732.967.014,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPTP YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 DESEMBER 2016
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	100,860,000.00	349.093.947.00	346,12	535,998,790.00
Jumlah Pendapatan		100,860,000.00	349.093.947.00	346,12	535,998,790.00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	9.400.926,000.,00	8.788.947.826,00	93,49	9,180,328,761.00
Belanja Barang	B.2.2	7,063,530,000.00	6.979.634.642,00	98,81	11,883,296,862,00
Jumlah Belanja Operasi		16,464,456,000.00	15.771.121.528,00	95,78	21,063,625,623.00
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.3	1.630,000,000.00	1.600.948.800,00	98,22	2,905,014,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.2.4	2.274,000,000.00	2.222.481.000.00	97,73	4,439,332,023
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	B.2.5	195.000.000,00	194.082.000,00	99,53	40.920.000,00
Jumlah Belanja Modal		4.099.000.000,00	4.017.512.700,00	98,01	7.385.266.023,00
Jumlah Belanja		20.563.456.000,00	19.786.095.168.00	96,22	28,448,891,646.00

II. NERACA

BPTP YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 Desember 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	200,00	200,00
Persediaan	C.1.3	73.150.800,00	1,622,355,000,00
Bagian lancar TP/TGR	C.1.4	66.830.000,00	0,00
Penyisihan piutang tak tertagih-bagian lancar TP/TGR	C.1.5	-334.152,00	0,00
Bagian Lancar TP/TGR (netto)	C.1.6	66.496.248,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		139.647.248,00	1,622,355,200,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	114.286.072.000,00	33,662,986,765,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	13.489.603.003,00	11,878,424,203,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	18.913.874.023,00	14,067,993,003,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	604.525.000,00	194,822,000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	20.923.500,00	20,923,500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	151.349.200,00	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.7	-8.237.301.278,00	-6,712,332,331,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.7	-548.638.441,00	-1,122,749,863,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.7	-18.041.000,00	-132,994,496,00
Jumlah Aset Tetap		138.645.358.510,00	51,857,072,781,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	0,00	0,00
Aset Lain-lain	C.3.2	0,00	165,489,184,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.3	0,00	-86,500,000,00

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Akumulasi Amortisasi Aset lainnya	C.3.4	0,00	-73,039,184.00
Jumlah Aset Lainnya		0.00	5,950,000.00
Jumlah Aset		138.785.005.758,00	53,485,377,981.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	52.038.744,00	29,670,262.00
Uang Muka dari KPPN	C.4.2	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		52.038.744,00	29,670,262.00
Jumlah Kewajiban		52.038.744,00	29,670,262.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	138.732.967.014,00	53,455,707,719.00
Jumlah Ekuitas		138.732.967.014,00	53,455,707,719.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		138.785.005.758,00	53,485,377,981.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPTP YOGYAKARTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	320.766.297,00	476,550,400,00
JUMLAH PENDAPATAN		320.766.297,00	476,550,400,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	8.810.035.714,00	9,180,491,005,00
Beban Persediaan	D.3	1.886.274.350,00	2,874.107.206,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.097.897.077,00	3,542,967,625,00
Beban Pemeliharaan	D.5	618.913.497,00	603,366,303,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.995.274.712,00	3,576,483,032,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	1.647.234.000,00	6.132.547.263,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	2.061.573.466,00	1,658,326,509,00
Beban Penyisihan Piutang tak tertagih	D.9	334.152,00	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		20.117.536.968,00	21,433,117,630,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-19.796.770.671,00	-20,956,567,230,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	0,00	52,000,000,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D10	838.882.330,00	1.056.641.490,00
JUMLAH PENDAPATAN		838.882.330,00	1.108.641.490,00
BEBAN			
Beban pelepasan asset non lancar	D.11	5.950,00	2.260,00
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	D.12	28.250.080,00	797.266.380,00
JUMLAH BEBAN		28.256.030,00	797.268.640,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		804.682.250,00	311.372.850,00,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		18.992.088.421,00	-26.780.365.693,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTP YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	53,455,707,719.00	52,183,724,424.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	--18.992.088.421,00	-26.780.365.693.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	84.823.395.245.00	-.9.032.868.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	0.00	0.00
Selisih revaluasi asset tetap	E.4.1	84.752.476.973,00	0.00
Koreksi Penyesuaian Nilai Aset Tetap non revaluasi	E.4.2	70.918.272,00	-9.032.868.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	19.445.952.471.00	28,061,381,856.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	85.277.259.295,00	1.271.983.295,00
EKUITAS AKHIR		138.732.967.014.00	53.455.707.719.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTP YOGYAKARTA

BPTP Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan untuk dapat menghasilkan inovasi teknologi pertanian, kelembagaan dan kebijakan pertanian spesifik lokasi yang diperlukan dalam membangun sector pertanian daerah yang tangguh dan berdaya saing.

BPTP Yogyakarta bertujuan untuk:

- a. Menyusun database dan informasi tentang potensi sumberdaya dan kebutuhan teknologi pertanian dalam rangka penyediaan informasi mutakhir untuk mendukung pengembangan pertanian di wilayah DIY.
- b. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang layak dan sesuai dengan potensi sumberdaya pertanian di wilayah DIY guna mendukung peningkatan ketahanan pangan dan mendorong berkembangnya agribisnis yang kompetitif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah DIY.
- c. Mengkomunikasikan dan menyebarluaskan teknologi pertanian melalui berbagai bentuk media dalam rangka mempercepat alih teknologi inovasi pertanian kepada pengguna serta penyampaian umpan balik bagi penajaman program penelitian pertanian wilayah maupun nasional.
- d. Meningkatkan jalinan lintas institusional yang lebih erat dan pelayanan kerjasama dengan kualitas prima.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana pendukung operasional balai dan kualitas sumberdaya manusia.

Untuk mewujudkan tujuan diatas BPTP Yogyakarta berkomitmen dengan visi “Menjadi Institusi Penghasil Inovasi Teknologi Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Berstandar Internasional untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Ekspor dan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian “.

PROGRAM UTAMA BPTP YOGYAKARTA

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran maka strategi yang akan ditempuh Balai untuk periode lima tahun ke depan secara rinci dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yaitu :

Kebijakan

- a. Memberdayakan sumberdaya Balai dan mendukung pemerintah daerah secara optimal.
- b. Menggali dan memanfaatkan sumber – sumber pertumbuhan produksi pertanian daerah.
- c. Memanfaatkan semua media komunikasi dan public figure dalam kegiatan diseminasi.
- d. Memperluas jaringan kerjasama penelitian.
- e. Memperluas kegiatan diseminasi vertical maupun horizontal.
- f. Mengembangkan pola perencanaan yang berorientasi kepada kebutuhan dan preferensi konsumen.

Program Kerja

Program kerja BPTP lima tahun ke depan mengacu pada program utama badan Litbang Pertanian yang memiliki lima program utama dan BBP2TP yang memiliki empat program utama dengan tiga belas sub program. Adapun Program Kerja BPTP untuk lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan Optimalisasi Sumberdaya Pertanian Spesifik Lokasi
2. Pengkajian dan Perakitan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi
3. Pengkajian model pengembangan Teknologi berbasis Permintaan pasar dan preferensi pengguna
4. Analisis kebijakan Pertanian yang bersifat Antisipasif dan Responsif
5. Diseminasi Inovasi Mendukung Program Strategi Deptan Pertanian dan Program Pembangunan Pertanian.
 - a. Pendampingan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)
 - b. Pendampingan program Pengembangan Kawasan Hortikultura
 - c. Pendampingan program Percepatan Swasembada daging sapi.
6. Percepatan Penyampaian Perkembangan Inovasi Pertanian
 - a. Percepatan Penyampaian Inovasi Pertanian (Roadshow, Gelar, Open House, Visitor Plot, Pameran dan Gelar Teknologi Tepat Guna serta Forum Komunikasi)
 - b. Pengembangan Diseminasi Parsitipatif (FEATI)
 - c. Pengembangan media informasi Inovasi Pertanian (Media Cetak dan Audio Visual)
7. Pengembangan jaringan Kerjasama Pengkajian dan Diseminasi dengan berbagai Lembaga Nasional dan Internasional.
 - a. PIPKPP/Program Intensif Peningkatan Kapasitas Peneliti dan Perekayasa.
8. Komersialisasi Teknologi Badan Litbang Pertanian

9. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga/pengelolaan program, evaluasi, kerjasama dan Instansi Pengkajian.
10. Program Peningkatan kualitas sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta pelayanan dan dokumen administrasi Laboratorium dll.

Dalam tataran praktisnya, BPTP Yogyakarta membuat rencana strategis kegiatan yang diyakini mampu mendorong terciptanya visi dan misi dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian. Kegiatan-kegiatan strategis tersebut meliputi :

1. Pengkajian Pengembangan Jogja Seed Center Mendukung Ketahanan Pangan dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat
 - a. Kajian Sistem Produksi Benih
2. Pendampingan Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)
 - a. Demplot Ternak Sapi Mendukung SL-PTT
 - b. Demplot Peningkatan Produksi Padi Menuju IP 400
 - c. Demplot Pengembangan Tanaman Padi Off Season
 - d. Pelatihan SL-PTT
 - e. Pendampingan SL-PTT
3. Pendampingan Program Pengembangan Kawasan Hortikultura
 - a. Demplot Pengembangan Biofarmaka
 - b. Demplot Pengembangan Bunga krisan
 - c. Pendampingan Program Pengembangan Kawasan Hortikultura.
4. Pendampingan Program Percepatan Swasembada Daging
 - a. Demplot Peningkatan Produksi Sapi
 - b. Demplot Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB)
 - c. Pelatihan
 - d. Pendampingan Percepatan Swasembada Daging
5. Informasi IPTEK, Diseminasi dan Jaringan Umpan Balik
 - a. Road Show
 - b. Visitor Plot

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTP YOGYAKARTA. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTP YOGYAKARTA menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP YOGYAKARTA dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP YOGYAKARTA yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP YOGYAKARTA adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua

belas} bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTP YOGYAKARTA telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	47,560,000.00	47,560,000.00
Pendapatan Jasa	53,300,000.00	53,300,000.00
Jumlah Pendapatan	100,860,000.00	100,860,000.00
Belanja		
Belanja Pegawai	9,342,294,000.00	9.400.926.00.00
Belanja Barang	7,061,380,000.00	7,063,530,000.00
Belanja Modal	2,197,000,000.00	4,099,000,000.00
Jumlah Belanja	18,600,674,000.00	20.563.456.000.00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 349.093.947,00 atau mencapai 346,12 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 100,860,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	%
Akun Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	47.560.000.00	162.881.700.00	342,47
Pendapatan Jasa	53.300.000.00	146.590.000.00	275,02
Pendapatan iuran denda		11.294.597,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0.00	28.327.650.00	0,00
Jumlah	100,860,000.00	349.093.947.00	346,11

Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami penurunan sebesar -36,65% dibandingkan TA 2016.

- a. Pendapatan dari pengelolaan BMN mengalami penurunan sebesar 54,16 % karena pada tahun 2016 terdapat lelang 2 unit kendaraan dan bongkaran gedung dan bangunan sedangkan di tahun 2017 hanya ada lelang untuk bongkaran gedung dan bangunan.
- b. Pendapatan jasa mengalami penurunan sebesar 15,39 % dikarenakan pendapatan dari sewa wisma berkurang karena adanya pembangunan gedung wisma sehingga pengunjungnya berkurang.
- c. Pendapatan lain lain mengalami peningkatan sebesar 280,3 % dikarenakan pada tahun 2017 ini terdapat penyelesaian tuntutan ganti rugi yang lebih besar nilainya dibandingkan tahun lalu.

Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTP YOGYAKARTA adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	162.881.700,00	355,290,400,00	-54,16
Pendapatan Jasa	146.590.000,00	173,260,000,00	-15,39
Pendapatan Lain-lain	28.327.650,00	7,448,390,00	280,3
Jumlah	339.523.947,00	535.998.790,00	-36,65

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2017 adalah sebesar Rp 19.786.095.168.00 atau 96,22% dari anggaran belanja sebesar Rp. 20,.563.456.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	9.400.926,000.00	8.810.323.005,00	93,40
Belanja Barang	7,063,530,000.00	6.979.634.642,00	98,81
Belanja Modal	4,099,000,000.00	4.017.512.700,00	98,01
Total Belanja Kotor	20.563.456.000,00	19.807.470.347,00	96.32
Pengembalian Belanja		21.375.179,00	
Total Belanja	20,504,824,000.00	19.786.095.168,00	96,22

Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar -45,60 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan anggaran yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

.Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	%
Belanja Pegawai	8.788.947.826,00	9,180,328,761.00	-4,26
Belanja Barang	6.979.634.642,00	11,883,296,862.00	-41,26
Belanja Modal	4.017.512.700,00	7,385,266,023.00	-45,60
Total Belanja	19.786.095.168,00	28,448,891,646.00	-45,60

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar 8.788.947.826,00 dan Rp 9,180,328,761.00 . Realisasi belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar -4,26 dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya beberapa pegawai yang memasuki masa purna tugas
2. Adanya pegawai yang mutasi ke instansi lain
3. Adanya beberapa pegawai yang tunjangan fungsionalnya dihentikan pembayarannya karena beralih ke tunjangan struktural yang nilainya lebih kecil.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8.730.216.005,00	9,117,564,430.00	-4,90
Belanja Lembur	80.107.000,00	80,100,000.00	-0,01
Jumlah Belanja Kotor	8.810.323.005,00	9,197,664,430.00	-4,21
Pengembalian Belanja Pegawai	-21.375.179,00	-17,335,669.00	
Jumlah Belanja	8.788.947.826,00	9,180,328,761.00	-4,26

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.979.634.642,00 dan Rp 11,883,296,862.00. Realisasi belanja barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar -41,26 % dari TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain karena:

- Adanya efisiensi dalam rangka penghematan anggaran.
- Berkurangnya belanja barang persediaan dan belanja perjalanan yang cukup signifikan.
- Pada tahun 2017 ini tidak terdapat belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat / pemda

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	465.461.000,00	541,396,000.00	-14,03
Belanja Barang Non Operasional	1.955.597.230,00	2,382,414,475.00	-17,91
Belanja Barang Persediaan	1.334.129.150,00	2,749,241,100.00	-51,47
Belanja Jasa	675.558.253,00	609,831,052.00	10,78
Belanja Pemeliharaan	553.614.297,00	490,022,203.00	12,97
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.995.274.712,00	3,576,483,032.00	-44,21

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	1,533,909,000.00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	6.979.634.642,00	15,579,456,287.00	-55,20
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	0.00
Jumlah belanja	6.979.634.642,00	15,579,456,287.00	-41,26

B.2.3 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.600.948.800,00 dan Rp 2,905,014,000.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami penurunan sebesar 44,89 % dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh menurunnya anggaran yang signifikan dan adanya efisiensi penghematan anggaran di BPTP Yogyakarta dibandingkan tahun 2016.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.600.948.800,00	2,905,014,000.00	-44,89
Jumlah Belanja Kotor	1.600.948.800,00	2,905,014,000.00	-44,89
Pengembalian Belanja	0,00	0.00	
Jumlah Belanja	1.600.948.800,00	2,905,014,000.00	-44,89

B.2.4 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.222.481.000.00 dan Rp 4,480,252,023.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 mengalami penurunan sebesar 50,40 % dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengurangan anggaran yang signifikan dan adanya efisiensi anggaran untuk penghematan, pada tahun 2017 terdapat pembangunan satu unit gedung wisma BPTP sedangkan pada tahun 2016 terdapat pembangunan tiga gedung kelji.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.222.481.000.00	4,480,252,023.00	-50,40
Jumlah Belanja Kotor	2.222.481.000.00	4,480,252,023.00	-50,40
Pengembalian Belanja			
Jumlah Belanja	2.222.481.000.00	4,480,252,023.00	-50,40

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0.00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Rekening Bank	0.00	0.00
Uang Tunai	0.00	0.00
Jumlah	0.00	0.00

C.1.2 KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 200.00 dan Rp 200.00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Sisa dana kerjasama luar negeri	200.00	200.00
Jumlah	200.00	200.00

C.1.3 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 66.830.400,00 dan Rp 0,00. Nilai ini diperoleh dari hasil audit Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian karena adanya kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pegawai atas nama Drh. Widodo Suwito, M.Si selama 26 bulan.

C.1.4 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH-BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 334.152,00 dan Rp 0,00. Nilai ini sebesar 5 per mil dari Bagian Lancar Tagihan TP/TGR sebesar Rp. 66.830.400,00

C.1.5 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 73.150.800,00 dan Rp 1.622.355.200,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi	10.403.800,00	10,056,000.00
Bahan untuk Pemeliharaan	0.00	0.00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0.00	758,945,000.00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0.00	164,440,000.00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0.00	327,790,000.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0.00	0.00

Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0.00	282,734,000.00
Bahan Baku	62.747.000,00	78,390,000.00
Jumlah	73.150.800,00	1,622,355,000.00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTP YOGYAKARTA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 114.286.072.000,00 dan Rp 33.662.986.765,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	33.662.986.765,00
Mutasi Tambah	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	80.623.085.235,00
Saldo per 31 Desember 2017	114.286.072.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0
Nilai Buku per 31 Desember 2017	114.286.072.000,00

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	1,868.00m ²	Jl. Rajawali No. 28, Demangan Baru Rt.-, Depok	19.333.800.000.00
2.	23,108.00m ²	Stadion Maguwoharjo No. 22, Sleman, Yk Rt.05/32, Ngemplak	65.164.000.000.00
3.	7,152.00m ²	Stadion Maguwoharjo No. 22 Sleman Rt.05/32, Ngemplak	21.627.000.000.00
4.	741.00m ²	Jl. Mosaes Gatotkaca Rt.01, 44.01, Depok	8.160.064.000.00
Jumlah			114.286.072.000,00

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTP YOGYAKARTA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.489.603.003,00 dan Rp.11,603,157,503.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	11,878,424,203.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	1.600.948.800.00
Transfer Masuk	10,230,000.00
Saldo per 31 Desember 2017	13.489.603.003.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-8.237.301.278.00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	6.252.301.725.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Pembelian yang terdiri dari ;
 - Workstation Rp. 418,870,000.00
 - Sice Rp. 127.522,000.00
 - Meja kerja besi/metal Rp. 39,036,000.00
 - Lemari kayu Rp. 46,650,000.00
 - Kursi besi/metal Rp. 147.860,000.00
 - Meja rapat Rp. 80.664,000.00
 - Lemari besi Rp. 80.060,000.00
 - Filling cabinet besi Rp. 13.390,000.00
 - Sepeda Motor Rp. 24.850.000,00
 - Tractor Tangan Rp. 232.369.000,00
 - Kendaraan roda tiga pengangkut barang Rp.88.605.000,00
 - Sprinkler Rp. 193.066.000,00
2. Transfer masuk berupa alat pengolah data yaitu satu buah laptop.

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTP YOGYAKARTA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.913.874.00.00 dan Rp. 14,067,993,003.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	14.067.993.003,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	1.022.864.000,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	4.555.685.826,00
Pengembangan melalui KDP	1.086.132.700,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-768.381.466,00
Saldo per 31 Desember 2017	18.951.738.023,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-548.638.622,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	18.913.874.023,00

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTP YOGYAKARTA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 604.525.000,00 dan Rp 194,822,000,00. Mutasi nilai Jalan Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	194.822.000,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	194.082.000,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	342.087.378,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-126.466.378,00
Saldo per 31 Desember 2017	604.525.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-35.048.244,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	569.476.756,00

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTP YOGYAKARTA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 20,923,500,00 dan Rp 20,923,500,00.

C.2.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPTP YOGYAKARTA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 151.349.200,00 dan Rp 0.00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTP YOGYAKARTA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp -8.820.988.216,00 dan Rp -7.968.076.690,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	13.489.603.003,00	8.237.301.278,00	5.252.301.725,00
2.	Gedung dan Bangunan	18.913.874.023,00	548.638.441,00	18.365.239.582,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	604.525.000,00	35.048.497,00	569.476.503,00
4.	Aset Tetap Lainnya	20.923.500,00	0,00	20.923.500,00
Akumulasi Penyusutan		33.028.925.526,00	8.820.998.216,00	138.645.358.510,00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0.00 dan Rp 0.00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

C.3.2 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPTP YOGYAKARTA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 68.808.960,00 dan Rp. 165.489.184,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPTP YOGYAKARTA serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTP YOGYAKARTA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp -0,00 dan Rp -159,539,184.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 52.038.744.00 dan Rp. 29.670.262.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPTP YOGYAKARTA per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	22.826.513,00	1,738,625.00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	29.212.231,00	27,931,637.00
Jumlah	52.038.744.00	29,670,262.00

C.4.2 UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0.00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 138.732.967.014,00 dan Rp. 53.455.707.719,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 320.766.297.00 dan Rp 476,550,400.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	30 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	17,580,000.00	100,00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga	146.590.000,00	155,680,000.00	5,83
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	139.322.500,00	291,490,000.00	52,20
Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	0,00	3,500,000.00	52,20
Pendapatan Penjualan lainnya	17.110.000,00	0,00	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.449.200,00	8,300,400.00	22,30
Pendapatan Denda Keterlambatan	11.294.597,00	0,00	0,00
Jumlah	320.766.297,00	476,550,400.00	280,34

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.810.035.714.00 dan Rp 9,180,491,005.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	5.711.378.260,00	5,923,129,900.00	3,57
Beban Pembulatan Gaji PNS	66.232,00	72,057.00	-8,08
Beban Tunj. Anak PNS	100.455.568,00	108,363,154.00	-7,29
Beban Tunj. Beras PNS	268.098.840,00	284,755,440.00	-5,84
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.410.180.000,00	1,397,270,000.00	0,92
Beban Tunj. PPh PNS	81.212.828,00	186,567,784.00	-56,47
Beban Tunj. Struktural PNS	12.625.000,00	12,960,000.00	2,58
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	396.739.986,00	414,874,670.00	-4,37
Beban Tunjangan Umum PNS	120.160.000,00	127,980,000.00	-6,11
Beban Uang Lembur	80.107.000,00	80,100,000.00	0,001
Beban Uang Makan PNS	629.012.000,00	644,418,000.00	-2,39
Jumlah	8.810.035.714,00	9,180,491,005.00	-95,80

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 1.886.274.350,00 dan Rp 2,874.107.206,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	1.003.180.390,00	1,100,720,500.00	-8,86
Beban Persediaan konsumsi	367.938.600,00	883.914.056.00	-58,37
Beban persediaan lainnya	515.155.360,00	889,472,650.00	-42,08
Jumlah	1.886.274.350,00	2.874.107.206,00	-109,31

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 3.097.897.077,00 dan Rp 3.542.967.625.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Bahan	888.791.430,00	1,112,955,475.00	-20,14
Beban Barang Non Operasional Lainnya	972.205.800,00	1,203,959,000.00	-19,24
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	138.200,000,00	124,800,000.00	10,73
Beban Honor Output Kegiatan	94.600.000,00	65,500,000.00	44,42
Beban Jasa Profesi	112.500.000.00	210,325,000.00	-46,51
Beban Keperluan Perkantoran	327.261.000,00	416,596,000.00	-21,44
Beban Langganan Listrik	346.931.480,00	254,897,160.00	36,10
Beban Langganan Telepon	11.907.367,00	12,184,990.00	-2,27
Beban Sewa	205.500,000,00	141,750,000.00	44,97
Jumlah	3.097.897.077,00	3,542,967,625.00	26,62

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 618.913.497,00 dan Rp 603,366,303.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	328.413.750,00	214,458,000.00	53,13
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	225.200.547,00	275,564,203.00	-18,27
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	64.024.200,00	71,569,100.00	-10,54
Beban Persediaan suku cadang	1.275.000,00	41,775,000.00	-96,94
Jumlah	618.913.497,00	603,366,303.00	-72,63

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.995.274.712,00 dan Rp. 3,576,483,032.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	1.725.121.768,00	2,717,598,524.00	-36,52
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	172.516.000,00	368,920,000.00	-53,23
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.500.000,00	156,200,000.00	-89,43
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	81.136.000,00	333,764,508.00	-75,69
Jumlah	1.995.274.712,00	3,576,483,032.00	-254,88

D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.061.573.466,00 dan Rp 1,658,326,509.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	436.323.706,00	287,516,563.00	51,75
Beban Penyusutan Irigasi	9.363.529,00	1,443,138.00	548,83
Beban Penyusutan Jaringan	1.115.850,00	1,115,850.00	0
Beban Amortisasi Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	73.039.184,00	0.00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.523.690.197,00	1,368,250,958.00	11,36
Jumlah	2.061.573.466,00	1,658,326,509.00	611,94

D.9 PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR

Jumlah pendapatan dari pelepasan aset non lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 52.000.000,00. Rincian pendapatan pelepasan aset non lancar untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan pendapatan pelepasan aset non lancar
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	0,00	52.000.000.00	
Jumlah	0,00	52.000.000,00	

D.10 BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR

Jumlah beban dari pelepasan aset non lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.950.000,00 dan Rp. 2.260,00. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan beban pelepasan aset non lancar
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban kerugian pelepasan aset	5.950.000,00	2.260,00	263,174
Jumlah	5.950.000,00	2.260,00	263,174

D.11 PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 838.882.330,00 dan Rp. 1.056.641.490,00. Rincian pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	66.830.400,00	0,00	0,00
Pendapatan pelunasan ganti rugi	28.327.200,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	450,00	7,448,390,00	99,99
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	455.229.500,00	234,970,000,00	75,74
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	288,494,780,00	814,223,100,00	64,56
Jumlah	838.882.330,00	1,056,641,490,00	89,80

D.12 BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah Beban dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar

Rp. 28.250.080,00 dan Rp. 797.266.380.00. Rincian beban dari kegiatan non operasional lainnya untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan beban dari kegiatan non operasional lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban penyesuaian nilai persediaan	28.250.080,00	793.780.730,00	96,44
Kerugian persediaan rusak / usang	0,00	3.485.650,00	100,00
Jumlah	28.250.080,00	797.266.380,00	196,44

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 53.455.707.719,00 dan Rp. 52.183.724.424,00

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp -18.992.088.421,00 dan Rp -26.780.365.693,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KOMULASIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 0.00 dan Rp. 0.00.

E.3.2 PENYESUAIAN NILAI ASET

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0.00 dan Rp. 0.00.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir

E.3.3 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 84.752.476.973,00 dan Rp. -0,00

E.3.4 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi nilai aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.70.918.272,00 dan Rp. -9.032.868,00

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 19.445.952.471,00 dan Rp 28,061,381,856.00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	19.786.095.168,00
Diterima dari Entitas Lain	-349.093.947,00
Transfer Masuk	8.951.250,00
Jumlah	19.445.952.471,00

E.5 KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

Nilai kenaikan/penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 85.232.657.295,00 dan Rp 1.271.983.295.00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 138.732.967.014,00 dan Rp 53.455.707.719,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

➤ **Entitas Pelapor**

- a. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang Pertanian yang berada di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alamat Jalan Stadion Maguwoharjo No. 22 Karang Sari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.
- b. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala dengan kedudukan sebagai Eselon III. Selain Kepala yang menduduki jabatan eselon III, terdapat dua struktural eselon IV yaitu pada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Kerjasama dan Pengkajian.
- c. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta sebagai UAKPA/B lingkup Badan Litbang Pertanian, sesuai dengan Permentan No. 41/Permentan OT.140/9/2008 tanggal 4 September 2008, mendapat tugas tambahan yaitu menjadi sekretariat dan koordinator UAPPA/B-W.

➤ **Inventarisasi dan Penilaian**

Pada periode tahun anggaran 2017 telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian atas Barang Milik Negara dengan tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2015. Hasil dari Inventarisasi dan Penilaian terlampir.